

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

ABSTRACT : MUH.ZULFIKAR, (B11109293), “Disparity of Deciding Verdict in Drugs Abuse Cases at Makassar District Court”, Supervised by Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S.,DFM as the first consultant and Hj. Haeranah, S.H., M.H as the second consultant.

Accordance with the thesis title which is proposed by the writer, this study aims to determine how the Judge’s consideration in deciding verdict to the drugs abusers, until causing disparity in Makassar District Court and what factors are causing disparity in sentences for cases of drugs abuse in Makassar District Court. In resolving the problems and achieving the aims, the approach which is used by the writer is empirical approach. It is a study of the real situation in the community with the purpose for finding facts, followed by finding problems, then identifying the problems and finally leads to problem solving. This study is conducted in Makassar District Court by studying multiple copies of decision which are related with the thesis title, and doing direct interview with the Judge of the case. In addition, the writer also conducts library research by examining the books, literatures, and legislations which are related with the issues are discussed in this thesis. Based on the results of the research in Makassar District Court found that, (1) Basic of the Judge’s considerations in sentence to the drugs abusers causing the disparity are the defendants have not been convicted, admitted and regretted their acts, being polite during the trial, such actions cause community unrest, the defendant is the breadwinner of the family, while (2) factors that cause the disparity of sentences for drugs abusers are factor of the legislations, resources of law enforcement, internal and external factors of the Judge, judicial authority in deciding, deciding mechanism by the Judges, the circumstances within the defendants.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara

Republik Indonesia 1945, sehingga hukum menempati posisi yang strategis dalam konstelasi ketatanegaraan. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu hukum

mempunyai kekuasaan tertinggi didalam negara. Hal ini mengandung makna bahwa, pemerintah, lembaga-lembaga negara dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam melakukan tindakan apapun harus berlandaskan hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebagai negara hukum Indonesia menempatkan hukum sebagai pilar dan hukum sebagai supremasi didalam negara. Memposisikan supremasi hukum didalam negara, maka hukum merupakan faktor penting dan terdepan dalam memberikan rasa aman, tentram dan berkeadilan bagi semua penduduk Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai negara hukum Indonesia menganut salah satu asas yang sangat penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah (Pasal 8 Undang-undang No. 14 tahun 1970). Jadi putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pembedaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pembedaan bukan muncul begitu saja melainkan

melalui proses peradilan yang sangat panjang. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur dan tidak memihak serta adil hal itu tentunya berkenaan dengan asas peradilan (Andi Hamzah 2010 : 238).

Penjatuhan pidana dan pembedaan dapat dikatakan cerminan peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan berakhir dengan penjatuhan pidana dan berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik, akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya tentu saja dinilai tidak sebaliknya pula, bahkan dicap sebagai kemerosotan kewibawaan hukum karena menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum serta dapat melahirkan krisis dibidang hukum.

Masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa masalah pemberian pidana adalah semata-mata menjadi urusan hakim semata. Hal ini terjadi karena seperti yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP dimana pemberian pidana hanya bersangkut paut dengan hakim saja, hal ini tidak benar seluruhnya, sebab misalnya dalam keputusan tentang pidana penjara, Hakim hanya menentukan batas-batas belaka sedangkan cara pelaksanaan pidana itu tergantung dari pihak lembaga pemasyarakatan dan juga kemungkinan untuk membebaskan secara bersyarat

adalah wewenang dari Menteri Kehakiman.

Menurut Pasal 21 dan 25 UUD Negara Republik Indonesia jo UU No.14 tahun 1970 masalah kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana sudah jelas diatur disana dimana keputusan hakim tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak manapun dan bebas dari intervensi lembaga apapun. Dengan kebebasan kehakiman inilah, maka keadilan diharapkan dapat tercipta sesuai dengan jiwa kemanusiaan serta keadilan sosial dalam masyarakat. Ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum harus dijalankan tanpa memandang bulu sehingga jikalau ada sesuatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum maka harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan jika ada perbuatan serupa, maka pidana tersebut juga harus dijatuhkan sama seperti yang sudah-sudah.

Keresahan akan muncul didalam masyarakat apabila hakim dalam keputusannya menetapkan pidana yang berbeda dalam kasus yang sama, walaupun keputusan tersebut sudah diambil dengan pertimbangan yang matang mengenai latar belakang masalah dan tentu juga motivasi serta keadaan dari terdakwa itu sendiri.

Bagi masyarakat awam tentu saja persoalan disparitas pidana ini menjadi suatu masalah yang sangat besar sebab bagi masyarakat tersebut hukum

dianggap sebagai pedoman yang bersifat tetap yang tak dapat berubah walaupun ada intervensi dari pihak manapun, kecuali sudah secara resmi dirubah melalui prosedur yang sudah semestinya.

Dengan terjadinya disparitas pidana tanpa ada penjelasan yang gamblang terhadap masyarakat umum maka berdampak munculnya rasa ketidakadilan dipihak terpidana sendiri maupun masyarakat yang tidak mengetahui latar belakang pemberian pidana tersebut.

Keadaan ini akan menjadi dampak yang sangat buruk bagi kepastian hukum serta lembaga peradilan kita. Apalagi, apabila disparitas pidana terjadi didalam perkara yang mendapat perhatian publik/masyarakat, seperti contohnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Kasus tindak pidana narkoba dalam praktek peradilan kita kadang kala menimbulkan gejolak dalam masyarakat dikala terdapat putusan hakim yang sangat jauh dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, disamping itu sanksi pidana yang dijatuhkan kadang kala berbeda antara terpidana satu dengan yang lainnya walaupun dengan kasus yang sama dengan dasar pembedaan yang sama pula.

Hak-hak warga negara adalah merupakan hak-hak asasi manusia yang dilindungi dan dijamin oleh negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D Ayat (1) yakni : Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama didepan hukum (*equality before the law*). Namun kenyataannya dalam proses penjatuhan pidana khususnya dalam perkara penyalahgunaan narkotika telah terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana di Pengadilan Negeri Makassar, dimana sepengetahuan penulis terdapat beberapa putusan hakim yang berbeda antara terpidana satu dengan yang lainnya walaupun dengan kasus yang sama dengan dasar pembedaan yang sama pula.

Berdasarkan kenyataan diatas,akhirnya menjadi faktor yang mendorong penulis untuk mengangkat judul “***Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara penyalagunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Makassar***”. Dengan mengacu pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara penyalagunaan narkotika sehingga menyebabkan terjadinya disparitas di Pengadilan Negeri Makassar ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya disparitas penjatuhan

pidana dalam perkara penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Makassar ?

PEMBAHASAN & ANALISIS

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sehingga Menyebabkan Disparitas Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar

Dari lingkungan peradilan kedudukan dan fungsi hakim memegang peranan yang sangat vital dalam terciptanya suatu proses peradilan yang adil dan memenuhi rasa keadilan dilingkungan masyarakat. Peranan Hakim menjadi sedemikian penting disebabkan hakim merupakan tumpuan terakhir dari suatu proses peradilan bagi masyarakat.

Dalam menyelenggarakan peradilan hakim mempunyai tugas menegakkan hukum yang mempunyai pengertian bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dengan perkataan lain hakim harus selalu menegakkan hukum tanpa harus melanggar hukum itu sendiri.

Dasar pertimbangan hakim ini merupakan langkah dan musyawarah antara majelis hakim yang sedang menangani suatu perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan atau dapat

dikatakan dasar pertimbangan harus dilakukan oleh hakim manakala akan menjatuhkan putusan. Di dalam pasal 25 Ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan semua perkara yang diadili wajib memuat dasar pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim ini dimusyawarahkan dalam rapat majelis hakim yang menangani suatu perkara tersebut.

Secara implisit di dalam undang-undang tidak diatur secara tegas mengenai penentuan berat ringannya pidana namun secara eksplisit dapat ditemukan beberapa ketentuan yang dapat digunakan bagi hakim sebagai pedoman yaitu:

1. Pasal 28 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004 bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari si petindak.
2. Pasal 52 ayat 1 Rancangan KUHP Tahun 2004 bahwa sebagai pedoman hakim

wajib mempertimbangkan kesalahan pembuat, motif tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat, sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap masa depan si pembuat, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh pidana terhadap tindak pidana dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan apakah tindak pidana dilakukan dengan cara berencana.

Dengan demikian adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan pemindaan harus didasarkan pada keyakinan hakim melalui alat bukti yang sah ditentukan oleh undang-undang, lebih lanjut dengan tidak adanya ketentuan pidana minimum umum dan hanya dicantumkan maksimum umumnya saja dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP maka besar kemungkinan akan tercipta variasi putusan yang sangat beragam. Hal demikian mengingat subyektifitas masing-masing hakim sebagai manusia individu pasti terdapat suatu perbedaan.

Perkara penyalahgunaan narkoba yang sebagaimana kita ketahui saat ini sedang marak-maraknya menjadi sorotan masyarakat, merupakan ujian

yang berat bagi lembaga peradilan dalam usaha menegakkan supremasi hukum dan agar selalu tercipta keadilan dalam masyarakat.

Menurut Makmur, S.H., M.H (Wawancara, Kamis 13 Desember 2012), bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara narkoba maka hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang ini dibuat oleh pemerintah karena berbagai macam pertimbangan yang meliputi pandangan bahwa kejahatan dibidang narkoba baik

itu meliputi penyalahgunaan, peredaran, produksi narkoba dan prekursor narkoba (peredaran narkoba antar negara) semakin berkembang dan memerlukan penanganan lebih khusus pula.

Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ini termuat dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 128, dengan variasi pidana yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kejahatan dan berat ringannya akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut serta jenis kejahatan serta cara kejahatan yang dilakukan.

Adapun gambaran yang jelas tentang jumlah kasus penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu tahun 2012. Dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel I Data Perkara Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2012 (Bulan Januari – Desember 2012)

No.	Bulan	Kasus Masuk	Putus Bulan ini			Jumlah
			Pria	Wanita	Anak	
1	Januari	55	43	4	3	105
2	Februari	40	23	2	1	66
3	Maret	64	28	4	-	96
4	April	60	36	5	1	102
5	Mei	70	66	2	3	141
6	Juni	54	61	8	1	124
7	Juli	34	57	10	1	102
8	Agustus	44	74	7	-	125
9	September	44	36	4	1	85
10	Oktober	38	46	5	3	92
11	Nopember	31	36	6	1	74
12	Desember	46	32	1	1	80

Sumber data : Pengadilan Negeri Makassar

Selanjutnya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang mengalami disparitas

dalam penjatuhan pidana yang diperoleh penulis dari pihak Pengadilan Negeri Makassar dalam kurun waktu tahun 2012. Masing-masing dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel II Data Perkara Yang Mengalami Disparitas Di Pengadilan Negeri Makassar (Tahun 2012)

No	No.Perkara	Terdakwa	Pasal Yang Didakwakan	Pidana
1.	1217/Pid.B/2012/PN.Mks	Atika Hasanuddin Alias Ika	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	1 (satu) tahun
2.	1093/Pid.B/2012/PN.Mks	Ekawati Dg Mene Alias Eka	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	2 (dua) tahun 8 (delapan bulan)
3.	700/Pid.B/2012/PN.Mks	Harum Abiyaksa	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	2 (dua) Tahun
4.	142/Pid.B/2012/PN.Mks	Ir.Azir Iswandi Alias Azir	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
5.	467/Pid.B/2012/PN.Mks	Firmansyah Alias Dede	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	1 (satu) tahun 4 (empat) bulan
6.	129/Pid.B/2012/PN.Mks	Muh.Farid	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	1 (satu) tahun
7.	1178/Pid.B/2012/PN.Mks	Irwan Alias Iwan	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	2 (dua) tahun 2 (dua) bulan
8.	483/Pid.B/2012/PN.Mks	Muh.Ridwan Rasyid	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	2 (dua) tahun
9.	78/Pid.B/2012/PN.Mks	Sakaria alias Sakka bin Dg.Ngitug	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	1 (satu) tahun

Sumber data : Pengadilan Negeri Makassar

Dengan adanya disparitas dalam penjatuhan pidana tersebut sehingga menjadikan tindak pidana tersebut menjadi perhatian masyarakat maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap kasus tindak pidana tersebut, dengan mengkhususkan pada adanya disparitas pidana yang terjadi pada putusan hukuman terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut.

Dalam praktek penyelenggaraan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Makassar, penulis menemukan adanya disparitas yang terjadi pada kasus narkoba, adapun gambaran disparitas tersebut penulis ambil berdasarkan temuan penulis sebagaimana tabel perkara narkoba diatas, adapun yang menjadi perhatian penulis yaitu pada putusan Nomor : 483/Pid.B/2012/PN.Mks dan putusan Nomor :

78/Pid.B/2012/PN.Mks.Dimana
kedua putusan ini memiliki
karakteristik yang hampir sama,

adapun penjabarannya sebagai
sebagai berikut :

A. Amar Putusan Nomor : 483/Pid.B/2012/PN.Mks

Tanggal : 13 Juni 2012

Identitas Terdakwa :

Nama Lengkap : Muh.Ridwan Rasyid alias A.Rasyid

Tempat Lahir : Makassar

Umur/Tgl Lahir : 34 Tahun / 08 Desember 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Monginsidi Lorong 17 No.39.Kota Makassar

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan
sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membacadsb ;

Menimbangdsb ;

Memperhatikan pasal-pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun
2009 tentang Narkotika :

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Muh.Ridwan Rasyid alias Lope bin A.Rasyid tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkankan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok LA berisikan 1 (satu) paket butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu,dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

B. Amar Putusan Nomor : 78/Pid.B/2012/PN.Mks

Tanggal : 15 Februari 2012

Identitas Terdakwa :

Nama Lengkap : Sakaria alias Sakka bin Dg.Ngitung

Tempat Lahir : Makassar

Umur/Tgl Lahir : 38 Tahun / 05 Mei 1974

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Dg.Siraju No.54 Makassar

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada
 Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan sekarang ;
 Pengadilan Negeri tersebut ;
 Membacadsb ;
 Menimbangdsb ;
 Memperhatikan pasal-pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Sakaria alias Sakka bin Dg.Ngitung tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan Narkotika ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkankan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet berisikan butiran kristal bening dengan berat netto 0,3841 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Dari contoh kasus perkara narkotika diatas,yang melibatkan terdakwa Sakaria alias Sakka bin Dg.Ngitung dan apabila kita perbandingan dengan putusan hakim yang memidana terdakwa Muh.Ridwan Rasyid alias A.Rasyid diatas jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan hukuman terhadap terdakwa, dimana diantara kasus tersebut mempunyai persamaan pasal yang didakwakan oleh majelis hakim yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009,Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 dan Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 yang mengaturnya serta ancaman yang dikenakan serta terhadap tindak pidana

yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, dimana terhadap terdakwa Muh.Ridwan Rasyid alias A.Rasyid dimana dia diputus oleh Majelis Hakim dengan hukuman jauh lebih berat yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dibanding terdakwa Sakaria alias Sakka bin Dg.Ngitung,yang dijatuhi putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dimana pasal yang dibuktikan sama yaitu pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,maka jelas terlihat adanya disparitas tersebut terjadi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap

Hakim yang pernah memutus perkara narkoba tersebut bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penyalah guna narkoba, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang tentunya akan menyebabkan terjadinya perbedaan putusan terhadap setiap perkara narkoba atau yang lazim masyarakat kenal dengan istilah disparitas pidana.

Menurut hasil wawancara dengan Makmur S.H., M.H (Kamis, 13 Desember 2012), dalam keterangannya kepada penulis menjelaskan bahwa dalam menerapkan suatu hukuman tidaklah semudah yang dibayangkan oleh setiap orang terlebih oleh masyarakat awam yang tidak mengetahui sistem peradilan yang ada, dimana banyak yang berpandangan bahwa apabila ada suatu perkara pidana maka putusannya harus sesuai dengan isi dari ketentuan perundang-undangan itu saja, jadi dengan kata lain pidana yang dijatuhkan harus seperti apa yang tertera dalam ancaman pidana dimana perbuatan pidana tersebut diancamkan, tanpa melihat faktor-faktor yang menyertainya serta pertimbangan-pertimbangan yang perlu diambil didalam persidangan. Lebih Lanjut, menurut Makmur, S.H., M.H (Wawancara, Kamis 13 Desember 2012) dengan penulis, menyatakan bahwa hakim dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan tidaklah melihat terdakwa dari

segi usia, baik itu anak dibawah umur yang dalam hal ini dibawah usia 21 tahun (KUHPerdota), orang dewasa maupun orang tua, pada dasarnya kedudukan mereka sama baik itu sebagai pemakai ataupun pengedar, selanjutnya beliau juga menambahkan jika putusan diatas terdapat perbedaan dari segi jumlah barang bukti namun memiliki kesamaan jenis narkoba yang digunakan yaitu shabu-shabu, namun hal tersebut bukanlah faktor yang dijadikan pembeda dalam berat ringannya saksi pidana yang dijatuhkan, selain itu hakim dalam memutus suatu perkara narkoba, dalam hal ini pengguna narkoba, hakim terkadang melihat pengguna sebagai korban dari oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan narkoba yaitu penggedar. Sehingga sering terjadi perdebatan antara majelis hakim dalam menentukan berat ringannya putusan apa yang pantas dijatuhkan terhadap terdakwa, sebagaimana hal-hal tersebut dikarenakan tidak diatur didalam UU No.35 Tahun 2009.

Dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalah guna (pengguna) narkoba akan disajikan pada table berikut ini, antara lain:

Tabel III Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Dasar Pertimbangan Hakim
1	483/Pid.B/2012/PN.Mks	Muh.Ridwan Rasyid alias Lope bin A.Rasyid	<ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa belum pernah dihukum • Terdakwa bersikap sopan selama persidangan • Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya • Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat • Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba secara ilegal • Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
2.	78/Pid.B/2012/PN.Mks	Sakaria alias Sakka bin Dg.Ngitung	<ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa belum pernah dihukum • Terdakwa bersikap sopan selama persidangan • Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya • Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat • Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba secara ilegal • Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Dari putusan diatas yang diputus oleh hakim terlihat jelas jika terdapat kesamaan dalam hal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dari tabel tersebut di atas akan diuraikan satu persatu dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan

1. Terdakwa belum pernah dihukum

Hal mendasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya

narkoba sehingga menyebabkan adanya perbedaan putusan (disparitas pidana) dalam putusan tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadi salah dasar sehingga terjadi disparitas dalam pemberian pidana terhadap penyalah guna (pengguna) narkoba, yaitu :

pidana yaitu apakah terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau belum pernah dihukum. Dalam hal memberatkan pidana, dimana diatur dalam KUHP hanya terdapat

tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana salah satunya yaitu *residive* atau pengulangan tindak pidana yang sama. (Zainal Abidin 2007 : 427)

Dari kedua terdakwa diatas belum pernah ada dihukum sebelumnya sehingga hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat meringankan pidana, berdasarkan putusan kedua terdakwa diatas penulis menemukan di kedua putusan tersebut ada kesamaan dimana kedua-duanya baru pertama kali dihukum sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan pidana, namun yang penulis temukan putusan kedua terdakwa dalam hal ini berbeda satu sama lain hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.

2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Salah satu yang menjadi faktor hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yaitu keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa yang mana dalam hal ini terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam proses persidangan terlebih dalam kasus narkoba, hakim betul-betul memperhatikan sikap terdakwa mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan sampai persidangan, apakah si terdakwa betul mengakui perbuatannya dan apakah terdakwa betul-betul menyesal, hal tersebut membutuhkan pertimbangan karena sebagaimana diketahui banyak orang yang dihukum dalam kasus narkoba, penyesalan akan perbuatannya hanya bersifat sementara, dimana

ketika bebas dari tahan mereka kembali menggunakan narkoba dan akhirnya kembali masuk tahanan, perbuatan tersebut dilakukan sampai berulang kali. Oleh karena itu berat ringannya pidana yang dijatuhkan hakim dalam perkara narkoba memperhatikan betul keadaan dalam diri terdakwa yakni terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan.

3. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Dalam proses persidangan salah satu yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan dilihat dari sikap terdakwa selama proses persidangan hal ini tentunya kembali terhadap keadaan-keadaan yang terdapat didalam diri terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan hakim dapat meringankan dan dapat juga memberatkan pidana tergantung sikap dari terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana yang meringankan apabila terdakwa didalam proses persidangan mengikuti segala aturan dalam proses persidangan seperti halnya saat persidangan terdakwa memberikan keterangan terkait tindak pidana yang ia lakukan secara jelas dan tidak bertele-tele, terdakwa menghormati proses persidangan, sopan dalam mengikuti proses persidangan dan sebagainya. Sebaliknya hakim dapat menjatuhkan pidana yang memberatkan apabila terdakwa dalam menjalani proses persidangan terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan tentang tindak pidana yang dilakukan dan sebagainya.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap putusan kedua terdakwa diatas dalam proses persidangan keduanya,dianggap oleh hakim telah membantu memperlancar jalannya persidangan dengan bersikap sopan dan menghormati persidangan dengan demikian hakim bisa memperingan pidana terhadap mereka.

4. Perbuatan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat

Didalam menjatuhkan pidana dalam perkara narkotika hakim wajib mempertimbangan,yaitu salah satunya pengaruh tindak pidana tersebut kepada keluarga terdakwa dan masyarakat.Dalam hal ini penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang dilakukan kedua terdakwa diatas telah menimbulkan dampak besar didalam masyarakat yaitu meresahkan keluarga terdakwa sendiri,warga sekitar lingkungan tempat tinggalnya maupun masyarakat secara luas. Meresahkan masyarakat disini memiliki artian bahwa ada pengaruh-pengaruh negatif yang dianggap sangat berbahaya oleh masyarakat dimana dalam hal ini terdakwa dapat menyebarkan pengaruh penggunaan narkotika secara ilegal kepada masyarakat dalam hal penggunaan narkotika baik itu sebagai pecandu maupun sebagai pengguna.Oleh karena itu tindak pidana yang meresahkan masyarakat tersebut dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yang bisa memberatkan terdakwa sebab perbuatan yang dilakukan telah menimbulkan dampak yang kurang baik yaitu meresahkan

masyarakat secara umum akan pengaruh dari narkotika tersebut.

5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.hal itu merupakan salah satu faktor yang bisa dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana.Pidana yang dijatuhkan disini, akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa maupun keluarganya. Dari kedua kasus narkotika diatas yang dijadikan sampel, pada kasus narkotika diatas dalam perkara No.483/Pid.B/2012/PN.Mks terdakwa Muh.Ridwan Rasyid alias Lope bin A.Rasyid dan perkara No.78/Pid.B/2012/PN terdakwa Sakaria alias Sakka bin Dg.Ngitung, merupakan tulang punggung keluarga,yang mana sehari-hari bekerja guna menghidupi keluarganya.Dengan dasar pertimbangan tersebut hakim bisa menjatuhkan pidana yang lebih ringan karena hakim melihat dampak yang akan terjadi pada keluarga terdakwa apabila terdakwa mendapat pidana yang lebih berat,sebab terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang biasa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Makassar

Untuk mengetahui kiranya yang menjadi penyebab disparitas pembedanaan (*Disparity of sentencing*), dalam hal ini perkara penyalahgunaan narkotika, terkait judul yang diambil, penulis melakukan studi terhadap 2 (dua) kasus narkotika yaitu putusan No.483/Pid.B/2012/PN.Mks dan putusan No.78/Pid.B/2012/PN.Selain itu, adapun sumber tambahan diambil dari kajian kepustakaan menggunakan beberapa buku-buku, literatur-literatur maupun sumber-sumber bacaan yang terkait.

Dalam kenyataannya, acapkali disparitas pembedanaan terjadi cenderung mengabaikan nilai-nilai keadilan, misalnya yang dilakukan oleh hakim terhadap kasus-kasus narkotika. Bilamana disparitas pembedanaan ini kemudian dikaitkan dengan suatu program yang dipersiapkan untuk merencanakan atau mengelola fasilitas kelembagaan juga program untuk merehabilitasi tahanan didalam masyarakat, termasuk instruksi dalam prinsip-prinsip dan praktek koreksi, serta staf manajemen narapidana & lembaga pemasyarakatan (*correction administration*), maka disparitas penjatuhan pidana dapat berakibat fatal. Terpidana setelah melakukan koreksi ataupun perbandingan pidana kemudian akan merasa menjadi korban dari pembedanaan. Terpidana juga akan menjadi orang yang kehilangan

penghargaan terhadap hukum, padahal seperti kita ketahui, penghargaan terhadap hukum adalah bagian dari cita-cita atau tujuan dari pembedanaan. Dimana disparitas penjatuhan pidana akan menimbulkan resiko yang fatal terhadap masalah pembedanaan, sebab hal ini bermanifestasi sekaligus melahirkan indikasi daripada suatu kegagalan sistem untuk mencapai keadilan bersama didalam negara hukum. Tak hanya itu disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan hukum pidana.

Faktor yang menjadi penyebab disparitas pembedanaan misalnya disebabkan oleh perangkat peraturan perundang-undangan itu sendiri yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika, sumber daya aparat penegak hukum, faktor internal dan eksternal hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana kita ketahui hakim juga manusia biasa yang dapat terpengaruh dari hal-hal didalam maupun diluar dirinya, kekuasaan kehakiman dalam mengambil keputusan serta keadaan-keadaan dalam diri terdakwa.

Faktor-faktor yang disebutkan ini tak sedikit memiliki korelasi antara yang satu dengan yang lainnya. Klasifikasi faktor yang mejadi penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap perkara narkotika dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perangkat Peraturan Perundang-Undangan

Didalam peraturan perundang-undangan pidana baik itu yang ada di dalam KUHP maupun ketentuan-ketentuan khusus yang berada diluar KUHP tidak ada satu pasal pun yang mencerminkan pengaturan penghukuman/ pemidanaan terhadap seseorang dengan jelas, artinya ketentuan-ketentuan pemidanaan yang diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP tidak memberikan pemidanaan tertentu kepada seseorang yang telah melakukan delik kejahatan (*ficks sententeces*). Adanya batas minimum dan maksimum dalam ketentuan pidana di negara ini membawa konsekuensi terhadap aparat penegak hukum baik itu kepada jaksa/penuntut umum dalam hal pemberian tuntutan hukuman kepada seorang terdakwa, maupun kepada hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya kepada seseorang terdakwa.

Adanya batasan maksimum dan minimum tersebut dalam prakteknya membuat para penegak hukum baik itu pihak jaksa/ penuntut umum bebas membuat tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika maupun bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya. Kecenderungan terjadinya disparitas terlebih lagi disparitas putusan pidana sering kali dijumpai dalam praktek peradilan pidana. Akibatnya putusan yang dijatuhkan memberi kesan adanya ketimpangan keadilan dalam perlakuannya terhadap terdakwa itu sendiri, apalagi terhadap terdakwa yang diancam hukuman lebih berat

dengan memperbandingkan terdakwa yang dijatuhi pidana lebih ringan. Padahal kapasitas keduanya hampir sama. Terjadinya ketimpangan keadilan disini salah satunya disebabkan karena di dalam peraturan regulatornya pun hanya mencantumkan batas maksimum dan minimum ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika secara umum, tidak membahas masalah pengklasifikasian ancaman pidana terhadap penentuan hukuman yang didasarkan pada jumlah barang bukti yang diajukan ke pengadilan. Tidak adanya aturan hukum yang jelas dalam penentuan hukuman terhadap terdakwa narkotika yang didasarkan pada jumlah barang bukti membuat para hakim terkesan bebas sekehendaknya dalam menjatuhkan pidana khususnya pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Menurut Makmur, S.H., M.H (Wawancara, Kamis 13 Desember 2012) menyatakan bahwa adanya batas maksimum dan minimum dari suatu peraturan perundang-undangan membuka peluang kepada hakim untuk dapat bergerak bebas dalam menentukan lamanya hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa, sehingga dengan sendirinya sangat berpeluang sekali terjadinya disparitas pidana antara putusan hakim yang satu dengan yang lainnya. Hakim disini mempunyai wewenang yang bebas untuk memberi penilaian tersendiri terhadap kasus pidana yang dihadapkan kepadanya, sehingga bisa saja penilaian yang dilakukan hakim yang satu dengan hakim yang lainnya berbeda. Jadi

pada intinya penilaian hakim tersebut bersifat subjektif.

Di lain sisi, salah satu penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya di mulai dari hukum itu sendiri, dimana hukum tersebut membuka peluang terjadinya disparitas pidana dikarenakan adanya batasan minimum dan maksimum pemberian hukuman, sehingga hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat.

Didalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendakinya, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengamanan pidana yang diatur dalam undang-undang.

Sebagai contoh misalnya, perumusan yang terdapat dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"

Dari bunyi pasal diatas tampak jelas bahwa ancaman hukuman yang ada terkesan tidak tegas dan hanya memberikan ancaman maksimumnya saja sehingga hakim disini berpeluang secara bebas untuk menggunakan dan memilih sendiri pidana yang paling tepat dan sesuai sepanjang tidak melebihi dari ketentuan pasal tersebut (empat tahun).

Kenyataannya dalam praktek di persidangan hakim

dalam menjatuhkan putusannya sering membuka peluang terjadinya disparitas pidana walaupun terhadap tindak pidana yang sama. Misalkan antara pengguna narkotika yang satu dengan yang lainnya terjadi penjatuhan pidana yang berbeda, dimana sebenarnya menurut hemat penulis telah terjadi ketidakadilan dalam perlakuan terhadap penyalahguna yang satu dengan yang lainnya. Memang dapat dibenarkan apabila dimungkinkan terjadinya disparitas pidana, dimana mungkin saja hakim menilai antara pengguna yang satu dengan yang lain menggunakan jenis narkotika yang berbeda, atau mungkin juga karena jumlah narkotika yang berbeda. Hal-hal tersebutlah yang memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap kedua pengguna tersebut, tapi penulis melihat dari undang-undang narkotika itu sendiri, baik kapasitasnya sebagai pengguna, perbedaan jumlah narkotika yang digunakan tidaklah menjadi pembeda lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada kedua pengguna yang berbeda.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sudarto (1981 : 79 - 80) mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam KUHP maupun di luar KUHP tidak memberikan pedoman pemberian pidana yang umum. Sehingga tidak memberikan pedoman yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana melainkan yang ada hanya aturan pemberian pidana saja.

2. Sumber Daya Aparat Penegak Hukum

Di dalam sistem peradilan, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim merupakan pilar yang sangat penting dalam penegakan supremasi hukum dinegara ini. Sehingga diharapkan aparat-aparat hukum ini dalam menjalankan tugasnya haruslah benar-benar bersikap profesional dan selalu menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai keadilan. Apabila aparat penegak hukum tersebut berbuat sebaliknya maka akan berbias kepada terdakwa itu sendiri sehingga dapat saja menimbulkan kesan bagi terdakwa sikap yang anti pati terhadap aparat hukum yang menjatuhkan putusan yang dinilai kurang adil, apalagi terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman lebih berat dari yang lainnya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa terjadinya disparitas terhadap berat atau ringannya hukuman bagi terdakwa tidak lepas dari adanya unsur permainan yang dilakukan oleh terdakwa dengan aparat hukum baik itu di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan bahkan terhadap hakim itu sendiri. Kecenderungan ini sering terjadi di lapangan, sehingga bagi terdakwa yang tidak melakukan upaya kolusi merasa adanya ketimpangan perlakuan terhadap keadilan itu sendiri, yang mana pada akhirnya membuat terdakwa tadi cenderung tidak percaya pada hukum terlebih lagi pada sistem peradilan dinegara ini.

Padahal hukum diciptakan bertujuan sebagai alat perlindungan kepentingan manusia, supaya kepentingan itu terlindungi, maka hukum harus

ditegakkan. Hakim disini mempunyai andil dan peran yang sangat penting, karena di tangan hakimlah diharapkan hukum dan keadilan itu ditegakkan secara *proporsional*, sehingga pada akhirnya putusan-putusan yang dikeluarkannya dapat dirasakan adil bagi terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hakim dalam menjalankan tugas yudisiilnya harus selalu memegang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka dari itu dalam menegakkan hukum, Hakim harus selalu memperhatikan 3 (tiga) unsur penting yang harus menjadi pedomannya yaitu :

- 1) Adanya kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
- 2) Mempunyai kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)
- 3) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (*gerechtigheit*)

Adanya ketiga komponen di atas membawa pengaruh yang signifikan terhadap pelaku kejahatan yang diajukan kemuka persidangan di mana putusan-putusan yang dijatuhkan nantinya akan membuat terdakwa itu dapat merenungi segala kesalahannya dan segera bertobat sehingga tidak mengulangi kejahatan lagi dimasa yang akan datang serta putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dirasakan adil bagi terdakwa itu sendiri. Selain itu, bagi masyarakat yang menilainya pun sudah dirasakan adil sehingga citra pengadilan dimata masyarakat akan meningkat dan tetap dihormati sebagai institusi hukum.

Untuk itulah diperlukan sosok aparat hukum yang benar-benar memahami kandungan yang

terdapat dalam peraturan perundang-undangan apalagi bagi hakim, sehingga dalam menjalankan tugas yudisialnya tetap berpegang pada norma-norma kepastian hukum, kegunaan dan keadilan serta kebenaran hukum.

Dalam kenyataannya tidak bisa dipungkiri, masih banyaknya dijumpai aparat-aparat hukum yang salah menggunakan norma-norma hukum yang sudah ada baik itu yang disengaja maupun tidak, dimana mungkin saja dikarenakan adanya kolusi antara terdakwa dengan aparat hukum tadi ataupun karena sumber daya aparat hukum tadi yang kurang dalam memahami dan mengerti maksud dari kandungan hukum yang terdapat dalam suatu perundang-undangan.

Khusus terhadap tulisan ini mengenai disparitas penjatuhan pidana oleh hakim dihubungkan dengan prakteknya di lapangan, sering memunculkan kesan yang kurang adil dimata masyarakat apalagi terdakwa dalam penjatuhan pidananya. Penjatuhan pidananya yang kurang adil ini sering diistilahkan dan diakibatkan karena adanya kesesatan hakim.

Dalam membicarakan masalah kesesatan hakim ini, tidak terlepas dari sorotan masyarakat terhadap putusan yang berupa penjatuhan pidana. Karena dalam praktek kadang-kadang hakim sebagai manusia biasa dengan segala kekurangannya dan keterbatasannya telah keliru dalam mengambil atau menyimpulkan tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga putusan yang dijatuhkan berakibat sangat merugikan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak

hanya tidak enak dirasakan pada waktu dijalani, akan tetapi sesudah itu pun orang yang dikenal masih merasakan akibatnya berupa "cap". Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut dengan "stigma", jadi orang tersebut mendapat stigma dan kalau ini tidak hilang maka terpidana tadi seolah-olah dipidana seumur hidup.

Apabila dilihat ke belakang sebelum suatu putusan dijatuhkan, maka akan nampak suatu rangkaian proses yang telah dilalui, yang berupa keputusan-keputusan mengenai :

- 1) Peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan ;
- 2) Hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu tindakan pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana pada akhirnya ;
- 3) Mengenai pidananya, yaitu apabila memang terdakwa dapat dipidana.

Rangkaian-rangkaian keputusan di atas harus menjadi pedoman bagi hakim dan harus dilalui oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan pidananya sehingga akan terhindar dari apa yang diistilahkan kesesatan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dan pada akhirnya putusan yang dijatukan nantinya dapat dirasakan adil dan tepat oleh terdakwa maupun masyarakat.

3. Faktor Internal Dan Eksternal Hakim

Pengaruh faktor ini dalam kaitannya dengan terjadinya disparitas pidana setelah penulis mengadakan pengamatan dan

wawancara terhadap hakim yang pernah memutus perkara tindak pidana narkoba adalah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjadi perhatian kita, sebab dalam kenyataan sehari-hari pengaruh psikis seseorang dapat sangat berpengaruh terhadap sesuatu yang dilakukan.

Sebagaimana mana menurut Soerjono Soekanto (1986 : 5) dalam teorinya Efektifitas Hukum menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan penegakan hukum. Penegak Hukum yang kita bicarakan pada konteks ini adalah Hakim.

Dapat kita bayangkan akibatnya apabila seseorang yang dalam keadaan psikis mempunyai beban mental yang tinggi menentukan sesuatu ketetapan yang menyangkut nasib banyak orang bahkan nyawa seseorang, pastilah dampak yang ditimbulkannya akan sedemikian hebat dan pengaruhnya menjadi preseden buruk bagi yang lainnya.

Faktor penyebab secara psikis dari hakim inilah yang penulis mencoba menggali dari hakim yang pernah memutus perkara narkoba di Pengadilan Negeri Makassar. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan hakim bersangkutan, menurut Makmur, S.H., M.H (wawancara, Kamis, 13 Desember 2012), menyatakan bahwa hakim dalam menentukan putusannya memang tidak terlepas dari keadaan psikis mereka sendiri. Hal ini mempunyai pengertian bahwa sangat manusiawi sekali apabila kita tengok kembali bahwasanya

hakim adalah juga sebagai manusia biasa dimana juga mempunyai keterbatasan baik kemampuan intelektual, keadaan fisik dan serta tingkat emosinya.

Dalam keterangannya kepada penulis menyatakan bahwa hakim bukanlah seseorang dengan kemampuan istimewa yang dapat menyelesaikan masalah di pengadilan dengan sempurna, tetapi kembali ke kodratnya hakim tetaplah manusia biasa yang pasti terpengaruh dengan kondisi dan hal-hal tertentu.

Adapun faktor-faktor penyebab disparitas pidana tersebut berdasarkan keterangan dari hakim yang pernah memutus perkara narkoba, yaitu dimana banyak sekali dipengaruhi baik dalam diri maupun dari luar diri hakim itu sendiri dalam menjatuhkan putusan yaitu :

1) Faktor Internal Hakim

a. Faktor latar belakang sosial

Latar belakang sosial sangat mempengaruhi hakim dalam memutus sesuatu perkara narkoba. Sangat manusiawi dan dapat dimaklumi bahwasanya berbagai pengalaman hidup antara hakim satu dengan yang lain sangat berbeda-beda sehingga hal ini menyebabkan banyak sekali pandangan yang berbeda dalam memutus perkara narkoba.

Seorang hakim yang mempunyai latar belakang sosial yang sangat dekat dengan masyarakat disekitarnya atau bahkan dengan masyarakat yang kurang mampu akan sangat berbeda putusan yang diambilnya apabila diperbandingkan dengan

hakim yang biasa hidup di kota dan interaksi dengan sekitarnya sangat kurang.

Pengaruh ini dapat terjadi karena faktor kedekatan emosional hakim sendiri dengan lingkungannya dan sudah pasti berbagai pengalaman hidup yang sering dia jumpai dan dia rasakan sehingga dalam pemeriksaan sidang pun perasaan dan pengalaman batin tersebut kadang mempengaruhi dalam mengambil putusan.

b. Faktor Pendidikan

Latar belakang pendidikan hakim juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya disparitas pidana. Perbedaan ini akan terjadi apabila para hakim tersebut dihadapkan dengan satu kasus yang sangat rumit dan membutuhkan analisis dan telaah keilmuan yang mendalam, sehingga jelas hal ini juga akan berpengaruh terhadap hasil putusan yang diambil para hakim itu sendiri, apakah ia telah memahami betul posisi kasus tersebut, selain itu latar belakang pendidikan mesti ditopang dengan seberapa jauh pengalaman hakim tersebut dalam memutus perkara narkotika sehingga dengan pengalaman tersebut dapat membantu hakim guna menganalisis posisi kasus lebih jauh.

c. Faktor Perangai

Berdasarkan penelitian penulis mengenai faktor perangai ini apakah berpengaruh terhadap keputusan yang diambil hakim adalah bahwasanya sebagai manusia yang mempunyai emosi dan perasaan dan dengan kondisi

fisik dan lingkungan yang berlainan maka jelas berpengaruh dalam proses pemeriksaan saat sidang berlangsung.

Karakteristik manusia secara umum dimana ada yang berperangai mudah marah, penyabar, tegas dan sebagainya adalah sudah menjadi karakteristik dari hakim itu sendiri sebagai manusia biasa. Jelas keputusan dan suasana dalam persidangan akan berlainan apabila sidang pengadilan dipimpin oleh hakim yang berbeda perangainya dan hal ini pasti akan berpengaruh juga pada sikap dan tindakan terdakwa begitu juga terhadap hadirin yang lain.

d. Faktor Umur

Umur seseorang dengan berbagai pengalaman hidup yang beraneka macam menyebabkan perubahan sifat dan sikap seseorang dan menambah daya kepekaan seseorang dalam menangani masalah tertentu.

Hakim yang mempunyai pengalaman hidup dan mangabdikan sebagai hakim sudah berpuluh-puluh tahun dengan pengalamannya menangani kasus-kasus yang berlainan akan mempunyai kearifan dan kebijaksanaan yang berbeda apabila dibandingkan dengan hakim muda dimana pengalaman dalam menghadapi kasus dan teknik memutus masih kurang dalam pengalamannya sehingga terjadilah perbedaan putusan yang mengakibatkan terjadinya disparitas pidana.

e. Faktor Jenis Kelamin

Dalam lingkungan Pengadilan Negeri Makassar, faktor jenis kelamin bukan merupakan jenis sesuatu yang dapat membedakan keputusan yang diambil oleh hakim, khususnya dalam kasus narkoba tidak terpengaruh dari jenis kelamin terdakwa, namun dalam kenyataannya putusan antara hakim laki-laki dan perempuan terkadang berbeda, berbeda dalam hal putusan dimana terdakwa seorang perempuan yang dimana hakimnya juga seorang perempuan tentunya putusannya berbeda jika hakimnya seorang laki-laki, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan ada beberapa kasus yang diputus oleh hakim berjenis kelamin perempuan berbeda dengan hakim berjenis kelamin laki-laki meskipun terdakwa sama-sama berjenis kelamin perempuan.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini mempunyai pengertian bahwa faktor diluar kondisi fisik dan psikis dari hakim itu sendiri, misalnya pengaruh kondisi terdakwa yang mempunyai latar belakang dan alasan melakukan tindak pidana, faktor keadaan lingkungan terdakwa serta perkembangan rasa keadilan dalam masyarakat dimana tercermin dari maraknya masyarakat menyorot kasus tindak pidana tertentu menjadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.

Dalam kasus tindak pidana diatas pada dasarnya hal yang sangat memberatkan adalah bahwa alasan karena kasus narkoba saat ini sedang marak-

maraknya dan menjadi sorotan masyarakat di kota Makassar maka hal ini membawa konsekuensi bahwa jelas hakim akan terpengaruh juga apabila masyarakat menghendaki suatu kasus yang menjadi perhatiannya diadili secara adil dan setimpal dengan perbuatannya.

4. Kekuasaan Kehakiman Dalam Mengambil Keputusan

Dimana Hakim memiliki kekuasaan merdeka dalam proses penyelenggaraan peradilan dan praktek penegakan hukum. Hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan menjadi benteng terakhir dari keadilan dimana mempunyai kebebasan untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif dalam pengancaman pidana yang ada didalam undang-undang dan memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh pengundang-undang adalah maksimum dan minimumnya. Posisi hakim ini menjadi kuat sebab kedudukannya secara konstitusional mendapatkan jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada Bab IX Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga dalam batas-batas maksimum dan minimum tersebut hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat.

Bunyi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada Bab IX Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 24 Ayat (1) sebagai berikut :

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

Selanjutnya, kekuasaan kehakiman didalam peradilan diperkuat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berikut bunyi Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 1 dan Pasal 2 :

Pasal 1 : Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 2 : Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peluang yang diberikan oleh Undang-undang tersebut membawa konsekuensi terjadinya disparitas pembedaan. Dalam praktek peradilan yang menangani perkara narkoba sering ditemukan terjadi disparitas pidana yang tidak saja mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tetapi juga jenis pidana serta praktek pelaksanaan pidana tersebut. Sementara menurut hemat penulis, tidak ada alasan pembenar bagi hakim untuk

menjatuhkan saksi pidana dengan berat ringan yang bervariasi,terlebih jarak antara berat ringannya sanksi tersebut terlampaui jauh. Pelaku wajib diberi sanksi yang berat agar menyesal dan jera untuk tidak melakukan kembali perbuatannya yakni menggunakan narkoba secara tidak sah menurut undang-undang, selain itu moral yang ditinggalkan kemasyarakatan kepada masyarakat sangat buruk dimana pelaku dianggap aib dalam masyarakat yang menggunakan obat terlarang tersebut dan dapat menjadi pengaruh buruk dilingkungan masyarakat. Dalam kondisi ini, hakimlah yang harus berfikir jernih dan menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan sanksi yang relatif dimana beratnya sama karena rasa keadilan buat pelaku dan keluarga pelaku terlebih kepada pendapat masyarakat. Tapi kenyataannya selama 1 (satu) tahun terakhir (Bulan Januari – Desember), berdasarkan penelitian penulis terdapat variasi penjatuhan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim, baik itu hakim yang sama terlebih dengan hakim yang berbeda, sebagai mana kasus diatas, sebab tiap-tiap hakim memiliki pendapat, keyakinan serta penafsiran yang berbeda-beda dalam menangani perkara narkoba.

5. Mekanisme Pengambilan Keputusan Oleh Majelis Hakim

Dalam mendapatkan suatu keputusan yang adil, majelis hakim melakukan musyawarah, musyawarah tersebut diadakan antara anggota majelis hakim. Para anggota hakim saling bertukar pikiran atas dasar surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan

kemudian para anggota majelis hakim masing-masing mengambil kesimpulan atas perkara yang sedang di sidangkan tersebut. Dalam prakteknya, musyawarah antara anggota majelis hakim ini tidak selalu alot dan saling mempertahankan argumentasinya, sehingga hakim sering bersilang pendapat terhadap kasus yang dihadapi tersebut, sebab pada saat pemeriksaan di sidang masing-masing anggota majelis hakim sudah memiliki kesimpulan sendiri. Jadi dalam musyawarah itu sebenarnya hanya saling mendengarkan pendapat dan pada gilirannya saling menyepakati pendapat anggota majelis hakim yang secara materil dan formil sudah ditemui akurasi kebenaran dan keadilannya.

Jadi dalam mengambil suatu keputusan, prinsip musyawarah dan mufakat merupakan hal yang harus diupayakan sedapat mungkin, tetapi jika hal tersebut tidak dapat dilakukan meski berulang kali dicoba, maka selanjutnya Pasal 182 Ayat (6) sub a KUHAP yang menentukan bahwa putusan diambil dengan suara terbanyak, lalu apabila cara voting ini masih juga belum berhasil, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa, sesuai menurut ketentuan Pasal 182 Ayat (6) sub b KUHAP.

Lazimnya, jarang sekali majelis hakim dalam menangani perkara narkoba sampai pada tahap yang dimaksudkan Pasal 182 Ayat (6) sub b tersebut, sebab umumnya majelis hakim yang mengadili suatu perkara narkoba terdiri dari 3 (tiga) orang, Dengan jumlah ganjil itu apabila voting

menyangkut putusan apa yang hendak diambil, maka ada 2 (dua) di antara 3 (tiga) itu yang sepakat atau setidaknya tidaknya mendekati kata sepakat, jadi pendapat kedua orang itulah yang dijadikan putusan.

Musyawarah diantara anggota majelis hakim kadang-kadang sering berlarut bila menyangkut pertimbangan keadaan terdakwa jika dipenjara sehingga hal ini menyebabkan majelis hakim saling bersilang pendapat mengenai sanksi apa yang tepat dijatuhkan, karena dalam menilai seorang terdakwa kemungkinan dapat insyaf disebabkan pidana yang diberikan berbeda-beda. Dalam hal seperti ini, pilihan putusan diambil biasanya dalam musyawarah setelah sidang dinyatakan ditunda sampai pada waktu tertentu, sidang berikutnya adalah untuk mendengarkan putusan dari majelis hakim atas perkara tersebut.

Yang sering memberikan indikasi penerapan undang-undang narkoba tidak konsisten oleh majelis hakim adalah apabila putusan yang diambil sanksinya sangat jauh dari apa yang diterapkan dalam undang-undang narkoba, hal ini erat hubungannya dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang dihadapi.

Dalam hal pengambilan keputusan, baik itu dengan cara musyawarah atau voting sebagaimana yang diatur dalam KUHAP Pasal 128 Ayat (6) sub b yang dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara narkoba, dengan cara tersebut besar kemungkinan

terjadinya kesenjangan putusan terhadap kasus berikutnya dengan kata lain akan terjadi disparitas pidana dalam hal pengambilan keputusan oleh majelis hakim. sebagaimana yang dibahas sebelumnya diatas dalam mengambil suatu keputusan hakim terkadang bersilang pendapat melihat kasus yang sedang di sidangkan tersebut, untuk mengambil keputusan yang adil maka majelis hakim memilih putusan yang mana menguntungkan terdakwa. Bicara mengenai putusan yang menguntungkan terdakwa maka hal tersebut tentunya akan melahirkan putusan yang nantinya akan berbeda-beda bahkan cenderung jauh dari apa yang ditentukan dalam undang-undang narkotika. Dalam kenyataan hal tersebut banyak dijumpai di pengadilan yang mana banyak terdapat putusan yang diputus oleh hakim sangat bervariasi atau berbeda-beda sehingga putusan-putusan tersebut melahirkan yang namanya disparitas pidana dalam hal perkara narkotika. (Moh. Taufik Makarao, dkk ; 2003 : 72-74).

6. Keadaan-Keadaan Dalam Diri Terdakwa

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan ada 2 (dua) yaitu faktor-faktor yang datangnya dari dalam diri pelaku dan faktor-faktor yang datangnya dari luar diri pelaku. Kejahatan yang datangnya dari dalam diri pelaku, bisa saja terjadi karena pelaku sudah terbiasa untuk melakukan kejahatan, artinya apabila pelaku tersebut melakukan suatu kejahatan maka dirinya akan merasa puas. Bisa juga ada

kelainan jiwa dari diri pelaku atau kejahatan itu sendiri sudah menjadi profesinya sedangkan kejahatan yang datangnya dari luar diri pelaku bisa saja terjadi karena adanya pengaruh pihak lain yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu kejahatan atau karena faktor ekonomi dan faktor lainnya yang memungkinkan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Pengertian kejahatan dapat ditinjau dari berbagai segi:

1. Dari segi Yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan pelanggarnya diancam dengan sanksi.
2. Dari segi Kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat.
3. Dari segi Psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.

Terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana narkotika tidak terlepas dari keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa, hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 28 Ayat (2), dimana hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi terdakwa bisa menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk perkara yang sama. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 55 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2006 yaitu:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;
4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan/atau;
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Dalam persidangan, hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk melakukan berat atau ringannya pidana akan dijatuhkan harus mendasarkan diri dengan melihat dan menilai keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa, apakah terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau tidak, sopan atau tidaknya terdakwa dalam persidangan, mengakui & menyesali perbuatannya atau tidak. Pertimbangan juga dilakukan terhadap apa dan peranan dan posisi terdakwa serta jumlah barang bukti yang diajukan ke persidangan yang turut mempengaruhi berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa. Seperti yang dikemukakan oleh Makmur, S.H.,

M.H hakim di Pengadilan Negeri Makassar terjadinya disparitas penjatuhan pidana bersifat kasuistik. Terjadinya perbedaan itu disebabkan oleh keadaan-keadaan seperti:

- a. Apakah terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau tidak;
- b. Faktor-faktor yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana narkoba, misalnya : keadaan ekonomi, lingkungan dll;
- c. Tingkat pengetahuan/pemahaman terdakwa, misalnya: Tingkat pengetahuan/pemahaman terdakwa, misalnya: perbedaan tingkat pendidikan atau profesi pelaku;
- d. Apa peranan terdakwa;
- e. Cara melakukan tindak pidana antara terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain berbeda;
- f. Jumlah barang bukti.

Hakim dalam menjatuhkan pidananya, sedapat mungkin menghindari diri dari putusan yang timbul dari kehendak yang sifatnya subjektif. Walaupun hakim mempunyai kebebasan untuk itu, akan tetapi hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena adanya kontrol dari masyarakat yang menjadi kendali terhadap setiap putusan hakim apabila putusan tersebut tidak menunjukkan rasa keadilan masyarakat atau menjunjung perasaan keadilan masyarakat. Dalam kenyataannya sering dijumpai putusan hakim yang sangat kontradiktif dengan rasa keadilan masyarakat sehingga kewibawaan hukum itu sendiri sudah hilang di mata masyarakat. (Agustina Wati Nainggolan, 2009 : 128-131).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap disparitas pidana dalam perkara penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Makassar, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut sebagai berikut:

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan, untuk itulah diperlukan perangkat Undang-Undang yang mengatur sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba, yaitu: Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Tujuan dibuatnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Adapun dalam penulisan skripsi ini undang-undang yang digunakan sebagai acuan yaitu Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan untuk memberantas peredaran gelap narkotika (Prekursor Narkotika) Oleh sebab itu, semua rumusan delik dalam undang-undang tersebut di atas terfokus pada penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta prekursor narkotika mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas peredaran sampai ke pemakainya, serta peredaran narkotika lintas negara, bukan pada kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Sanksi dan ppidanaannya pada undang-undang tersebut bervariasi antara lain:

- 1) Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan pengusiran.
- 2) Jenis/lamanya pidana bervariasi.
- 3) Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara

kumulatif (terutama penjara dan denda).

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika sehingga menyebabkan timbulnya disparitas pidana di Pengadilan Negeri Makassar, adalah :

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum
- 2) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- 3) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- 4) Perbuatan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat
- 5) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Adapun Faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas dalam perkara penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Makassar adalah:

- a) Perangkat Peraturan Perundang-undangan
- b) Sumber Daya Aparat Penegak Hukum
- c) Faktor Internal Dan Eksternal Hakim
- d) Kekuasaan Kehakiman Dalam Mengambil Keputusan
- e) Mekanisme Pengambilan Keputusan Oleh Majelis Hakim
- f) Keadaan-Keadaan Dalam Diri Terdakwa

Dengan adanya disparitas pidana ini menyebabkan belum tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat. Tujuan hukum yang memberi kemanfaatan juga belum tercapai karena banyak pelaku tindak pidana narkoba mengulangi lagi perbuatannya. Kalau untuk kepastian hukum dengan dipidanya pelaku tindak pidana narkotika sudah memberi kepastian hukum bagi masyarakat, bahwa pelaku kejahatan harus mendapat hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal. 2007. *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika
- Agustina Wati Nainggolan. 2009. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan)*
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi 2008*, Jakarta : Rineka Cipta.
- _____. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Djamali, Abdoel. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Fatoni, Syamsul. 2008. *Pendekatan Logika Hukum Sebagai Upaya Meminimalisir Disparitas Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. JURNAL MEDIA HUKUM Volume.5
- Makaro, Taufik dkk. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Arif, Barda, N. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung : PT. Alumni.
- Rusli, Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Alfabeta.
- Sujono dan Daniel, Bony. 2011. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta Timur : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 1946)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Sumber Internet

<http://setaaja.blogspot.com/2012/03/peimbangan-sosiologis-dalam-putusan.html> , (Diakses pada Jum'at, 12 Oktober 2012).

<http://www.eprints.uns.ac.id/340/1/162992708201009511.pdf>, (Diakses pada Jum'at, 20 Oktober 2012).

<http://pamangsah.blogspot.com/2008/10/strategi-coping-pengguna-narkotika-dan.html> (Diakses pada, Sabtu 5 Januari 2013).